

# LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2009)
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi A, 2009)
3. Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Alamat : Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183  
Telp. (0274) 387656 (hunting), Fax. (0274) 387646

Nomor : 1028/A.2-VIII/IV/2015

Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth.  
Walikota Yogyakarta  
C.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta  
di Tempat

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada:

Nama : Nurul Odjiviana

No. Mahasiswa : 20100520034

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Waktu Penelitian :  
3 (Tiga) bulan

Judul Penelitian :  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN  
PENDUDUK DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2014.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 April 2015



Ali Muhammad, S.IP, MA., Ph.D.  
NIP. 19710731.200501.1001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

1. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2009)
2. Program Studi Ilmu Pemerintahan (Terakreditasi A, 2009)
3. Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Alamat : Kampus Terpadu, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183  
Telp. (0274) 387656 (hunting), Fax. (0274) 387646

Nomor : 1028/A.2-VIII/III/2015

Hal : ***Ijin Penelitian***

Kepada Yth.  
Walikota Yogyakarta  
C.q. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  
di Tempat

***Assalaamu'alaikum Wr. Wb.***

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Nurul Odjiviana  
No. Mahasiswa : 20100520034  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian :  
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

Waktu Penelitian :  
3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN  
PENDUDUK DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2014.**

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 31 Maret 2015



Ali Muhammad, S.I.P., MA., Ph.D.  
NIP. 19710731.200501.1001

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
KANTOR KELUARGA BERENCANA

Jl. Depokan KG.II/242 Kode Pos : 55171 Telp (0274) 371173. 384196 Fax :384196  
E-mail : [kbb@jogjakota.go.id](mailto:kbb@jogjakota.go.id).E-mail Intranet [kbb@intra.jogja.go.id](mailto:kbb@intra.jogja.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001.2740 HOT LINE E MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Untuk rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christiana Siwi Subektyastuti, SH  
Jabatan : Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

Yang pertama disebut pihak pertama

Nama : Haryadi Suyuti  
Jabatan : Walikota Yogyakarta

Yang kedua disebut pihak pertama

Yang kedua disebut pihak kedua

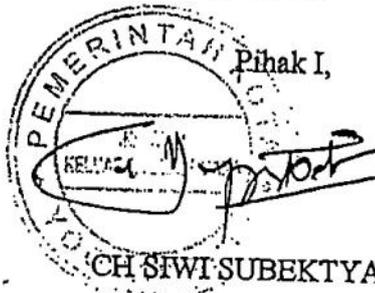
Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dan penilaian atas kualitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta,

01 MAR 2013

Pihak II,  
  
HARYADI SUYUTI

Pihak I,  
  
CHRISTIANA SIWI SUBEKTYASTUTI, SH

1	2	3	4	5
a pelayanan KB yang berkualitas atau	a Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	0,35%	Program Keluarga Berencana 1 Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana	2.390.625.000
	b Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65%	72,64%	2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.537.495.000
	c Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) 5%	13,22%		
	d Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	83,74%		
	e Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	88,14%		
	f Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%		
	g Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%		

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

tingkat Daerah : Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta  
: 2013

Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
<p>nyanan KB yang jangkau</p>	<p>a Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5%</p> <p>b Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65%</p> <p>c Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) 5%</p> <p>d Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%</p> <p>e Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%</p> <p>f Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) Desa/Kelurahan</p> <p>g Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan</p> <p>h Cakupan penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun</p> <p>i Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun</p>	<p>0,35%</p> <p>72,64%</p> <p>13,22%</p> <p>83,74%</p> <p>88,14%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

Berencana : Rp. 6.739.400.669,00

KEPALA  
KANTOR KELUARGA BERENCANA  
KOTA YOGYAKARTA



**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama Unit Organisasi  
Tugas Pokok  
Urusan

Kantor Keluarga Berencana  
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	Bidang / Seksi Pengampu
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas dan terjangkau	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	$K = \frac{\text{Jumlah PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Pendataan keluarga (MDK)	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	$K = \frac{\text{Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F//Dal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	$K = \frac{\text{Jumlah PUS IAT + TIAL}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F//Dal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	$K = \frac{\text{Jumlah anggota BKB yang Ber KB}}{\text{Jumlah anggota BKB}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F//Dal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	$K = \frac{\text{Jumlah anggota UPPKS yang Ber KB}}{\text{Jumlah anggota UPPKS}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F//Dal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Sumber Data	Bidang / Seksi Pengampu
1	2	3	4	5	6
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	$K = \frac{\text{Jumlah PLKB/PKB}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F/IDal	Sub Bag Tata Usaha
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	$K = \frac{\text{Jumlah Kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F/IDal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	$K = 100\% - 30\% - 40\% = 30\%$	RKA & DPA SKPD	Bagian penyimpanan dan pengurus alokon yang melekat di Sub Bag Tata Usaha
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	$K = \frac{\text{Rekap data mikro keluarga}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$	Aplikasi BKKBN.go.id F/IDal	Bagian data yang melekat di Seksi Keluarga Berencana

**LAPORAN BULANAN PENGENDALIAN LAPANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA (SIDUGA)**

BULAN : Desember  
KABUPATEN/KOTA : Kota Yogyakarta  
PROVINSI : DI YOGYAKARTA

TAHUN : 2013  
NO. KODE KABUPATEN/KOTA : 347  
NO. KODE PROVINSI : 34

KEADAAN UMUM			
NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH YANG DILAPORKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	14	14
2	PLKB/Petugas KB Kecamatan	0	0
3	Desa/Kelurahan	45	45
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	28	28
5	P P K B D	45	45
6	Sub P P K B D	615	615
7	Kelompok KB	2532	2532
8	Kelompok Kegiatan BKB	239	239
9	Kelompok Kegiatan BKR	75	75
10	Kelompok Kegiatan BKL	98	98
11	Kelompok Kegiatan UPPKS	231	229
12	Jumlah PDK Remaja	36	37
	a. Jumlah PDK Remaja Tumbuh	30	31
	b. Jumlah PDK Remaja Teguk	3	3
	c. Jumlah PDK Remaja Tegar	3	3

KEGIATAN OPERASIONAL		
NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	Frekuensi Operasional Mupin Kabupaten/Kota	0
2	Frekuensi Rakor Program KB tingkat Kecamatan	14
3	Frekuensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan	44
4	Frekuensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB	207
5	Frekuensi KIE dengan menggunakan KIE KR	86
6	Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang Aktif melaksanakan KIE KB	99
7	Frekuensi TKDK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan	24
8	Frekuensi TKDK dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	0

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA				
NO	URAIAN	BKB	BKR	BKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	6939	2516	3185
2	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	6338	2129	2842
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam perencanaan/ penyuluhan	5388	1702	2417
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	5539	1682	2022
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	2057	682	856
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB	4550	1418	1590
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi Peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	1664	560	714
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	214	73	92
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	3269		

IV. PEMBINAAN KESPIJHATERAAN KELUARGA			
NO	URAIAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :		
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	4383	
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS Keluarga Pra S dan KS I	1735	
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :		
2.1	Anggota dari Seluruh Tahapan KS		
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	3129	
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	2687	
2.2	Anggota dari Tahapan Pra S dan KS I		
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS	1454	
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber KB	1108	
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	199	
NO	URAIAN	JUMLAH SUMBER MODAL	JUMLAH MODAL (Rp.)
4	Jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh/mengakses bantuan modal dan jumlahnya pada bulan ini :	30	Rp 623,000,000
	a. APBN	0	Rp 0
	b. APBD	5	Rp 95,000,000
	c. Krida	0	Rp 0
	d. KUR	0	Rp 0
	e. PNPB	0	Rp 0
	f. Lainnya	25	Rp 528,000,000

V. PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER KB					
NO	URAIAN	PELAYANAN PEMERINTAH	PELAYANAN SWASTA	SELURUH TAHAPAN KS	TAHAPAN PRA S & KS I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)			46908	14745
2	Jumlah Peserta KB Aktif :	15317	19556	34873	10480
	a. JUD (J)	5482	4955	10437	2723
	b. MOW (OW)	1133	960	2093	714
	c. MOP (OP)	91	135	226	77
	d. KODDOM (K)	1543	4600	6243	1673
	e. IMPLAN (IP)	678	311	989	348
	f. SUNTIK (S)	4380	6671	11051	3527
	g. PIL (P)	1910	1924	3834	1310
3	Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB :			12035	4265
	a. Hamil (H)			1640	536
	b. Ingin Anak Segera (IAS)			5390	1498
	c. Ingin Anak Ditunda (IAT)			2137	848
	d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)			2868	1383

**CATATAN :** Laporan ini harus sudah diterima di BKKBN Provinsi sebelum berakhirnya tanggal 10 bulan berikutnya.

ISSUE-ISSUE STRATEGIS

ISU STRATEGIS				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Akademik
1	2	3	4	5
1	Reproduksi merupakan hak asasi, pembatasan jumlah anak tidak diperbolehkan dengan cara yang represif	Laju Pertumbuhan penduduk cenderung meningkat Pasca Orde Baru	Jumlah unmet need masih tinggi (13,32%)	laju pertumbuhan penduduk pesat
2	Laju Pertumbuhan penduduk dunia yang cepat, khususnya di negara berkembang	Pendapatan perkapita masih rendah	Penggunaan alkon jangka pendek lebih banyak daripada alkon jangka panjang	Terjadi ledakan jumlah penduduk tanpa dilmbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia
3	HPI (Indeks pembangunan manusia) rendah, nomor 111 dari 182 negara	Kualitas sumberdaya manusia menempati urutan ke 6 di Asia Tenggara	Belum meratanya masalah pengetahuan kespro remaja	Daya tampung dan daya dukung lingkungan makin terbatas
4	Capaian MDG's	Jumlah penduduk miskin makin banyak, harga kontrasepsi makin mahal	Penduduk miskin belum terlayani secara gratis di Pusat Pelayanan Kesehatan	MDG's sulit tercapai tanpa pengendalian penduduk dan peningkatan SDM

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD  
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi:				
No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat (Misi ke 9)			
-	Program kesehatan			
		Angka Kematian Ibu (AKI) karena melahirkan masih tinggi	Belum optimalnya pelaksanaan program "Tiga Terlambat" dan "Empat Terlalu"	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mencapai target MDG's
		Angka Kematian Anak (AKB) masih tinggi	Belum optimalnya pelaksanaan program "Tiga Terlambat" dan "Empat Terlalu"	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mencapai target MDG's
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan (Misi ke 10)			
-	Program			
	Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan kelompok UPPKS	masih sedikitnya keluarga Pras Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang memiliki kelompok usaha	Promosi dan peningkatan ketrampilan kelompok UPPKS
	Penguatan Perekonomian Daerah	Pendampingan dan pengembangan kelompok UPPKS	Keterbatasan kemampuan PKB dalam program pendampingan kelompok UPPKS	Fasilitasi akses modal ke koperasi AKU Sejahtera Prop. DIY
				Rekrutmen tenaga teknis Fasilitator UPPKS
-	Program Kependudukan			
	Penyusunan data kependudukan yang lebih valid yang dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.	Regulasi tentang Kebijakan kependudukan	Kependudukan belum dianggap sebagai issue sentral dalam pembangunan	Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
	Perwujudan norma keluarga kecil bahagia dan berkualitas	Ketahanan Keluarga	Kelekatan hubungan antar anggota keluarga mulai longgar	Penguatan ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Sejahtera